

# Pembebasan Lahan PT. BIG di Bombana Timbulkan Banyak Masalah

**Bombana, SultraNET.** | Proses pembebasan lahan untuk kegiatan industri pengolahan baja oleh PT. Bishi Industri Group (BIG) di Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menimbulkan berbagai persoalan pelik di masyarakat.

Betapa tidak, beberapa orang warga pemilik lahan menilai kehadiran perusahaan setelah sempat vakum selama dua tahun tidak lagi menunjukkan itikad baik dan komitmen pemberdayaan sebagaimana dijanjikan saat pertama kali masuk di Bombana untuk berinvestasi pada tahun 2019 lalu.

Salah seorang pemilik lahan Saharuddin, Selasa (15/11/2022) mengatakan setelah dua tahun penantian masyarakat terkait pembayaran lahan di PT. BIG akhirnya pemilik lahan mendapat angin segar terkait kepastian pembayaran, sayangnya kepastian pembayaran ternodai dengan praktik tidak adanya transparansi dalam prosesnya.

“Masih banyak persoalan yang harusnya di selesaikan sebelum melanjutkan transaksi jual beli namun itu semua tidak dilakukan dan merugikan kepentingan pemilik lahan,” ujar Saharuddin.

Aktivis Pemuda Mataoleo menyebut salah satu contoh permasalahan yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pembayaran adalah terkait dengan ukuran dan status lahan yang tidak sesuai dengan fakta lapangan yang sebenarnya.

Fakta lapangan dimaksud yaitu di data milik perusahaan lahan warga masuk kategori kosong sedangkan faktanya terdapat tanaman dan lahan tersebut masih produktif sampai saat ini.

Harga yang ditetapkan oleh perusahaan untuk lahan kosong hanya seharga 35 juta rupiah sedangkan untuk lahan produktif sebesar 70 juta rupiah.

“Ini dulu yang penting untuk diselesaikan sebelum proses pembayaran karena

berhubungan dengan besaran hak pemilik lahan, bukan seperti sekarang warga kendatipun masih bermasalah status lahannya sudah langsung diarahkan ke transaksi pembayaran,” tegas Saharudin.

Jika persoalan ini tidak kunjung diselesaikan, ia dan beberapa pemilik lahan lainnya menolak untuk menjual lahannya kepada perusahaan dan menarik semua dokumen lahan yang telah diserahkan sebelumnya.

Yang lebih parah lagi, manajemen perusahaan telah mengalami perubahan personil antara yang meminta lahan warga untuk dijual dengan melibatkan warga lokal hari ini sudah tidak dilibatkan lagi sehingga komitmen dan janji awal agar warga mau melepaskan lahannya kepada perusahaan saat ini sudah tidak ada kepastian lagi dan cenderung diabaikan.

“Kami awalnya mau melepas lahan kami karena ada janji janji dan komitmen yang itu sudah dituangkan dalam MoU (Memorandum of understanding.red) tapi oleh manajemen baru tidak dibicarakan lagi, kalau seperti ini kami tegas menolak melepas lahan kami,” tegasnya

Untuk itu, ia berharap agar manajemen lama perusahaan tidak lepas tangan dan tetap harus memastikan isi MoU dengan perusahaan yang dijanjikan untuk di notariskan agar tetap menjadi prioritas karena manajemen baru saat ini komitmen itu sudah tidak pernah dibahas lagi.

“Kami mau melepas lahan kami bukan cuma karena tawaran harga tetapi ada MoU yang disepakati dengan manajemen lama dan itu menyangkut kepastian kesejahteraan pemilik lahan usai lahannya dibeli oleh PT. BIG, kalau itu tidak ada lagi kepastian dan jaminan kami tegas menolak menjual lahan kami.” tandasnya.

Hingga berita dirilis manajemen PT. Bishi Industry Group (BIG) belum terkonfirmasi. **(IS)**

---

# Pihak Eksternal di Bombana Nilai Kinerja POLRI

**Bombana, SultraNET.** | Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dilakukan penilaian oleh pihak eksternal Polri Bombana melalui survey dengan menggunakan aplikasi indeks tata kelola Polri, bertempat di Aula Polres Bombana. Selasa (15/11/2022).

Kapolres Bombana Tedy Arief Soelistyo mengatakan kegiatan survey eksternal berbasis online itu dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

“Kegiatan ini untuk mengukur kinerja dan capaian reformasi Polri,” ujar Teddy Arief Soelistyo

Ia menyebut pelibatan elemen masyarakat dalam penilaian kinerja Polri agar didapatkan penilaian yang objektif, fair dan akurat sehingga output kegiatan ini dapat dijadikan rujukan pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja Polri.

“Outputnya sebagai bahan pimpinan mengambil kebijakan untuk memperbaiki kinerja Polri dimasa mendatang,” ujarnya

Pelaksanaan survey melibatkan berbagai pihak sebagai koresponden antara lain Kalangan birokrasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan insan Pers.

Tedy Arief Soelistyo berharap responden dapat memberikan penilaian secara objektif sehingga hasil survey menjadi akurat.

“Hasil survey ini sangat penting untuk perbaikan kinerja POLRI,” tandasnya.

Pewarta : Idris Hayang

---

# Sekolah di Bombana Terima Sertifikat PJAS

Rumbia, SultraNET. - Sebanyak 8 sekolah di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima Sertifikat Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), dari Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari, bertempat di Ruang Rapat Measa Laro Sekretariat Daerah, Selasa (15/11/2022).

Dalam sambutan Pj. Bupati Bombana yang dibacakan oleh Sekda Bombana Man Arfa, menyebut bahwa Aksi Nasional PJAS telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011.

Sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi dilakukan melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, Lembaga Pemerintah, dan Lintas Sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah.

“Kabupaten Bombana merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokus intervensi keamanan PJAS pada Tahun 2022 oleh BPOM dan hari ini dilaksanakan penyerahan sertifikat keamanan PJAS Aman Kepada Sekolah yang dinilai memenuhi persyaratan yaitu sekolah yang mendapatkan nilai minimal 70,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin Ismail mengatakan dengan tersampainya informasi yang benar tentang kesehatan kepada siswa maka diharapkan mereka akan memahami tentang pentingnya memilih jajanan sehat.

Ia menyebut, usia sekolah dan remaja termasuk generasi emas yang harus terpantau tumbuh kembangnya sehingga dengan sinergitas BPOM, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, ia berharap sekolah-sekolah di Bombana dapat meraih predikat paripurna pada Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) nya untuk memastikan jajanan yang tersedia di sekolah sehat dan bergizi.

“Dengan sinergitas semua pihak kita yakin sekolah sekolah di Bombana mampu meraih predikat paripurna,” singkatnya.

Adapun sekolah yang menerima sertifikat PJAS Aman antara lain : SMPN 2 Rumbia, SMPN 6 Rarowatu, SMPN 10 Poleang Selatan, SDN 08 Kasipute, SDN 27 Doule, SDN 33 Kasipute, MTSN 2 Bombana, dan MAN 1 Bombana.

Kedelapan sekolah yang telah menerima sertifikat PJAS Aman tersebut Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan agar terus melanjutkan kegiatan ini secara mandiri untuk keberlangsungan program intervensi keamanan PJAS di Kabupaten Bombana.

Nampak hadir pada kegiatan tersebut Kepala BPOM Kendari beserta rombongan, Para Asisten, staf ahli dan Kepala OPD, serta para undangan peserta kegiatan sertifikasi keamanan PJAS di Kabupaten Bombana. (Adv)

---

## **PKBM Matahari Bangsa di Visitasi Akreditasi**

**Bombana, SultraNET.** | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Matahari Bangsa Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana menjalani visitasi proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF), Sabtu (12/11/2022).

BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan PAUD dan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas melakukan visitasi terhadap kelayakan satuan pendidikan di PKBM Matahari Bangsa yaitu Muh. Irsal dan Bahtiar.

Kepada awak media, Muh. Irsal menjelaskan asesor yang melakukan visitasi di Bombana terdiri dari beberapa Tim sedangkan Timnya sendiri telah bekerja selama 4 hari dan bakal melakukan visitasi di 4 PKBM salah satunya yaitu PKBM

Matahari Bangsa yang baru saja selesai dilakukan.

Ia menyebut dalam proses visitasi akreditasi terdapat pengelola Satuan Pendidiri yang salah kaprah yang menganggap tim asesor sebagai tim audit atau tim pemeriksa.

Padahal menurutnya keberadaan tim visitasi adalah untuk menggali kembali capaian lembaga pendidikan selama berdiri.

“Pemerintah ingin tau sejauh mana capaian lembaga itu selama proses pembelajaran mereka,” ujar Muh. Irsal

Karena menurutnya selama ini banyak warga yang menganggur kemudian masuk belajar di PKBM, setelah menyelesaikan pendidikan warga tersebut kembali menganggur.

Padahal harapan Pemerintah agar lulusan dari pendidikan Non Formal kesetaraan Paket C telah memiliki basic kemampuan life skill punya ijazah dan bisa bekerja.

“Jika dulu Akreditasi ini berbasis dokumen, sekarang arahnya Pemerintah menggali apa yang sudah dicapai dengan kurikulum dan silabus yang ada,” bebrnya.

Ia menilai selama melakukan visitasi Pengelola satuan pendidikan memiliki motivasi yang tinggi untuk berbuat meningkatkan life skill warga belajarnya dengan memanfaatkan potensi daerah namun terkendala dengan fasilitas dan alat yang ada.

Salah satu contoh di Kecamatan Poleang Barat yang memiliki potensi Banyaknya sabuk dan tempurung kelapa yang menjadi limbah padahal jika dimanfaatkan sebagai kerajinan dapat bernilai ekonomi bagi warga belajar.

“Namun dari beberapa diskusi kami dengan pengelola bahwa kendalanya ada di peralatan dan fasilitas, inilah yang perlu disampaikan ke Pemerintah agar potensi ini dapat di manfaatkan,” jelasnya.

Ia menambahkan dengan adanya proses Akreditasi di satuan pendidikan sebagai penjaminan mutu pendidikan dapat memotivasi pengelola satuan pendidikan meningkatkan kualitas dan layanan di satuan pendidikan masing-masing.

“Kita berharap dengan proses akreditasi ini, kita dapat meningkatkan mutu pendidikan serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dapat diketahui oleh Pemerintah,” tandasnya. (IS)

---

# DPPKB Bombana Tingkatkan Kualitas Program Bangga Kencana

**Bombana, SultraNET.** | Untuk meningkatkan kualitas program Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar pertemuan bimbingan terpadu gelombang III. Sabtu (12/11/2022).

Kepala DPPKB Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si mengatakan kegiatan ini digelar bertujuan untuk peningkatan kualitas program Bangga Kencana dan juga upaya peningkatan kapasitas UPTD dan PKB/PLKB Dalam meningkatkan capaian kesertaan ber KB serta untuk mengetahui permasalahan tingkat lapangan dan strategi sehingga dapat berhasil ke depannya.

“Program Bangga Kencana adalah program yang berfokus dan menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan,” ujar Abdul Azis

Ia menyebut program ini mengarahkan agar keluarga mempunyai rencana berkeluarga sehingga terbentuk keluarga yang berkualitas. Menurutnya pelaksanaan program Bangga Kencana membutuhkan tenaga-tenaga yang andal, profesional dan berpengalaman agar tujuan dari program dapat tercapai baik dalam memberikan pelayanan, edukasi dan konseling kepada masyarakat.

“Kegiatan yang dilaksanakan hari ini sangat penting bagi kita dalam upaya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menyukseskan program Bangga Kencana di Kabupaten Bombana,” beber Mantan

Kadis Capil Bombana itu.

Dirinya berharap, seluruh Sumber Daya Manusia (SDA) yang ada di masing-

masing wilayah, menyamakan persepsi dalam pencapaian Bangga Kencana dan intervensi Prioritas yang dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan.

Ia menambahkan, program Bangga Kencana tidak sekedar penggunaan alat kontrasepsi dan mengatasi ledakan penduduk, tetapi merupakan program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan pembangunan sektor terkait lainnya.

“BKKBN diberi tugas sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan target yang harus turun menjadi 14 persen pada 2024. Itu bukan tugas ringan perlu dukungandan sinergitas semua pihak,” tutupnya.

---

## **Tingkatkan Kinerja Pelayanan Terbaik, DPPKB Bombana Siapkan Reward**

Rumbia, SultraNET. – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) punya cara tersendiri untuk meningkatkan kinerja jajarannya yang bertugas di Kecamatan dan Desa yaitu dengan memberikan reward jika mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepala DPPKB Bombana, H. Abdul Azis mengatakan reward bakal diberikan kepada para Sub Koordinator Penata Kependudukan Keluarga Berencana dan Kepala UPTD Balai Penyuluh (Ka. UPTD), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mampu menunjukkan kinerja dan pelayanan yang baik kepada Masyarakat.

“Itu saya kasih reward karena pencapaiannya bagus, pelaporannya bagus, pokoknya pelayanannya kepada masyarakat bagus tanpa pilih kasih,” ujar H. Abdul Azis usai memimpin langsung kegiatan Bimbingan Terpadu Penguatan Pelaksanaan Program Bangga Kencana 2022, yang dilaksanakan di Hotel Rahmat, Kelurahan Kasipute, Jumat (11/11/2022).

Mantan Kadis Capil Kabupaten Bombana itu menjelaskan adapun bentuk reward yang diberikan berupa kendaraan untuk memudahkan penerima dalam melaksanakan tugas di lapangan serta menjadi daya dorong buat aparatur lainnya dalam bekerja.

“Kalau kita berprestasi pasti ada penghargaan dari pimpinan,” jelasnya.

Pria yang aktif di Organisasi Radio Amatir itu berharap para Sub Koordinator Penata Kependudukan Keluarga Berencana dan Kepala UPTD Balai Penyuluh, Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana memberikan pelayanan yang terbaik dalam bekerja.

“Insya Allah akan mendapatkan reward dari saya selaku pimpinan,” Pungkasnya.

Ditempat yang sama Pelaksana Harian Kepala UPTD Kabaena Timur, Ajriah Am.Keb mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah memilih unit kerjanya untuk mendapatkan reward karena dinilai mampu menaikan target capaian dari yang sebelumnya hanya 60 persen pada bulan Mei 2022 hingga saat ini mampu mencapai angka 95 persen.

“Alhamdulillah dan terimakasih banyak buat Pimpinan, reward ini sangat membantu kami dalam menjalankan tugas tugas kami di lapangan, semoga ini juga menjadi pemicu buat kami untuk terus berbuat dan bekerja lebih giat lagi.” Singkat Ajriah.

---

## **Ribuan Guru Kumpul di Ibu Kota Bombana**

**Bombana, SultraNET.** | Lebih dari seribu orang guru dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara berkumpul di Rumbia Ibu Kota Kabupaten Bombana, Kamis (10/11/2022).

Kehadiran ribuan guru itu untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun

(HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) ke 77 Tahun.

Peringatan HUT PGRI dan HGN ke 77 Tahun dimeriahkan dengan Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni PGRI tingkat Kabupaten Bombana.

Kegiatan Porseni yang mengangkat Tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju dilaksanakan dari tanggal 10 hingga 17 November 2022 dan diikuti 12 PGRI Cabang Kecamatan Se Kabupaten Bombana.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Man Arfa saat mewakili Bupati Bombana menyampaikan sambutan mengapresiasi pelaksanaan Porseni yang dilaksanakan oleh PGRI Bombana.

Ia berharap kegiatan itu dapat membawa hasil yang maksimal sekaligus dapat meningkatkan semangat solidaritas dan kebersamaan para guru.

Selain dari itu, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bombana itu menyebut Pemerintah berharap agar para guru selalu meningkatkan kualitas dan kompetensinya.

“Kita berharap para Guru mampu menunjukkan karya nyata dengan melakukan pembentukan karakter bangsa yang lebih bermoral, bermartabat dan berdaya saing,” ujar Man Arfa

Kepada Pengurus PGRI ia berharap agar mampu merumuskan secara komprehensif upaya mencetak guru guru yang lebih peduli dalam menjalankan tugasnya secara disiplin bertanggung jawab dan lebih amanah.

Sebagai penutup mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana ia mengucapkan selamat dan sukses rangkaian kegiatan memeriahkan HUT PGRI dan HGN ke 77 tahun 2022.

“Kami ucapkan selamat bertanding, junjung tinggi sportifitas dan persaudaraan,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Ketua PGRI Bombana, Kandamang mengatakan kegiatan Porseni bertujuan sebagai wadah menyalurkan minat, bakat dan hobi para guru.

“Sasaran kegiatan ini adalah para guru dan tenaga kependidikan yang ada di

Bombana,” ujar Kandamang.

Ia merinci kegiatan Porseni bakal mempertandingkan 8 jenis olahraga, 5 kesenian serta lomba video pembelajaran.

“Kita berharap kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi antar guru sekaligus sebagai kontribusi nyata PGRI untuk kemajuan Daerah,” pungkasnya.

**Pewarta : Idris hayang**

---

# **Pasir Sungai di Desa Mambo Bombana Ditambang Ilegal**

**Bombana, SultraNET.** | Aktivitas Penambangan Pasir secara ilegal atau tanpa mengantongi perizinan terjadi secara masif di Daerah Aliran Sungai Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penambangan pasir dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator sudah terjadi sejak tahun 2021 hingga saat ini.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mambo, Sahiruddin. Kamis (10/11/2022) mengatakan akibat aktivitas tambang pasir yang berlangsung lama, salah satu asset yaitu tanggul batu yang dibangun Dinas Penanggulangan Bencana Daerah untuk penahan air banjir menjadi roboh.

Yang lebih parah akses jalan utama Desa menjadi rusak dan berlubang akibat alat berat yang lalu lalang bebas di atas aspal.

“Karena alat berat yang dipakai menambang pasir lalu lalang, jalan beraspal menjadi rusak,” ujar Sahiruddin.



Akses Jalan Desa Mambo

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bombana terkhusus Dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup serta Aparat Penegak Hukum Polres Bombana untuk turun dan melakukan tindakan agar kerusakan fasilitas dan lingkungan yang lebih besar akibat aktivitas tambang pasir dapat diminimalisir.

“Hancur jalanan kami, menderita kami pengguna jalan yang memakai motor, jalan berlubang dan banyak terhambur kerikil tajam di area pengolahan batu yang juga punya kaitan dengan penambangan pasir ilegal,” pungkasnya. (IS).

---

## Sekda Bombana Pimpin Upacara Hari Pahlawan

**Bombana, SultraNET.** | Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Man Arfa memimpin pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-77, bertempat di halaman Kantor Bupati Bombana, Kamis (10/11/2022).

Pada kesempatan itu, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bombana itu membacakan amanah Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini.

Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia masih harus berjuang menaklukkan ancaman dan tantangan yang nyata. Antara lain pemanasan global yang memicu beragam bencana alam serta kelangkaan pangan, energi dan air bersih.

Sebagai suatu bangsa diharapkan masyarakat selalu siap menghadapi bencana alam termasuk pandemi Covid-19 serta kelangkaan sumber daya dan harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan.

“Kita mempunyai semua modal dasar untuk menjadi bangsa pemenang,” ujar Man Arfa

Untuk mengenang jasa para pahlawa, hendaknya masyarakat berupaya memanfaatkan energi baru dan terbarukan dengan melakukan pengembangan sumber pangan berbasis potensi dan kearifan lokal.

“Ini sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan dan memperkuat keragaman pangan,” tandasnya.

---

## **KPU Bombana Sosialisasi Jelang Pendaftaran PPK dan PPS**

**Bombana, SultraNET.** | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sosialisasikan isu isu strategis jelang rekrutmen Badan Ad Hoc Pemilu 2024.

Badan Ad Hoc yang bakal segera direkrut yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Sosialisasi dikemas dalam kegiatan Anak Muda Ngopi (Ngobrol Pemilu) bertempat di salah satu kedai kopi di Ibu Kota Bombana, Rabu (9/11/2022).

Peserta kegiatan ini di dominasi Mahasiswa Politeknik Bombana (Polina) yang diperkirakan berjumlah lebih seratus orang.

Komisioner KPU Bombana, Abdi Mahatma mengatakan Pendaftaran Badan Ad Hoc KPU di Pemilu 2024, baik itu PPK maupun PPS, berbeda dengan Pemilu sebelumnya.

Jika sebelumnya dilakukan secara manual, namun pada Pemilu 2024 pendaftarannya akan dilakukan secara online melalui sistem teknologi informasi yang berbasis web yaitu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau disingkat SIAKBA.

“Untuk pendaftaran, Pelamar tidak perlu tenteng-tenteng berkas ke KPU,” ujar Abdi Mahatma

Adapun persyaratan secara umum untuk menjadi Badan Ad Hoc Pemilu 2024 diantaranya adalah warga negara Indonesia, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, adil. tidak menjadi anggota partai politik, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS.

Selanjutnya mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pendidikan paling rendah SMA .

“Sebelum mendaftar menjadi PPK atau PPS Pemilu 2024, agar dipastikan tidak menjadi pengurus partai politik,” jelas Mantan Jurnalis itu.

Ia menambahkan untuk melakukan pengecekan data apakah terdaftar di Partai Politik dapat dilakukan melalui halaman web. [www.infopemilu.kpu.go.id](http://www.infopemilu.kpu.go.id).

“Aduan juga dapat dilakukan melalui Help Desk KPU Bombana,” tandasnya. **(IS)**